ISIHUMOR
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/isihumor Publisher: putrapublisher.org

ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 5, No.1, Januari 2027 Hlm. 226-252

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DUA TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN PADA GEN Z PENGGUNA X DI DKI JAKARTA

Jinan Naura Salsabila[1], Khaisya Santi[2], Masageng Damar Pradianda[3], Shandy Nisrina Putri[4], Desy Hariyati[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Indonesia, Indonesia
Corresponding E-Mail: jinannaurasa@gmail.com

INFO ARTIKEL
Diterima: 10 Oktober 2026
Direvisi: 25 Oktober 2026
Disetujui: 29 Oktober 2026
Tersedia Daring: 29 November 2026

Kata Kunci:
Benevolence;
Competence;
Integrity;
Generasi Z;
Kepercayaan Publik.

ABSTRAK

Kepercayaan publik merupakan aspek penting dalam menjaga legitimasi pemerintah, terutama di tengah perkembangan media sosial yang semakin mempengaruhi hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepercayaan publik Generasi Z pengguna media sosial X di DKI Jakarta terhadap pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pasca-Pemilu 2024 melalui tiga dimensi, yaitu *Competence, Benevolence,* dan *Integrity*. Penelitian ini dilatarbelakangi dari masih terbatasnya kajian yang secara khusus menggambarkan kepercayaan Generasi Z pengguna X terhadap pemerintah pusat melalui ketiga dimensi tersebut dalam konteks pasca pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner secara daring dan luring pada Agustus hingga September 2026. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *quota sampling*, yang menghasilkan 573 responden setelah proses pembersihan data. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Kategorisasi tingkat kepercayaan publik secara keseluruhan didasarkan pada akumulasi skor 15 butir pertanyaan dengan skala Likert empat poin. Dari rentang skor teoretis 15-60, skor 15-37 dikategorikan rendah, sedangkan skor 38-60 dikategorikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah pusat, yaitu sebesar 71,2%. Pada dimensi *Competence* sebanyak 51,1% responden berada dalam kategori tinggi. Sementara itu, dimensi *Benevolence* didominasi kategori rendah sebesar 72,9%, diikuti dimensi *Integrity* sebesar 78%. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian positif terhadap kemampuan pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh kepercayaan terhadap kepedulian dan integritasnya. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman kepercayaan publik sebagai konstruk multidimensional, yang tidak hanya ditentukan oleh persepsi atas kompetensi pemerintah, tetapi juga oleh penilaian masyarakat terhadap kepedulian dan integritas pemerintah.

Keywords:
Benevolence;
Competence;
Integrity;
Generation Z;
Public Trust;

ABSTRACT

Public trust is essential to maintaining government legitimacy, particularly amid the growing influence of social media on the relationship between society and government institutions. This study aims to analyze the level of public trust among Generation Z users of social media platform X in DKI Jakarta toward the central government under President Prabowo Subianto following the 2024 General Election, based on three dimensions: Competence, Benevolence, and Integrity. This study is motivated by the limited number of studies that specifically examine public trust among Generation Z users of X toward the central government through these three dimensions in the context following the 2024 General

Election. This study employs a descriptive quantitative approach, with data collected through online and offline questionnaires distributed between August and September 2026. The study used non-probability sampling with a quota sampling method, resulting in 573 respondents after data cleaning. The data were analyzed using descriptive statistics with the assistance of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The overall level of public trust was categorized based on the cumulative scores of 15 questionnaire items measured using a four point Likert scale. The theoretical score range was 15-60, with scores of 15-37 classified as low and scores of 38-60 classified as high. The findings indicate that most respondents have a low level of public trust in the central government, accounting for 71.2%. In the Competence dimension 51.1% of respondents were classified in the high category. Meanwhile, the low category dominated the Benevolence dimension at 72.9%, followed by Integrity at 78%. These findings show that positive perceptions of the government's competence have not been fully accompanied by trust in its benevolence and integrity. Theoretically, this study contributes to the understanding of public trust as a multidimensional construct, which is shaped not only by public perceptions of government competence but also by their assessments of government benevolence and integrity

© 2026
This is an open access article under CC-BY license

1. Pendahuluan

Kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi legitimasi pemerintahan karena berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kepercayaan mencerminkan penilaian masyarakat mengenai kemampuan pemerintah memenuhi harapan serta menjalankan tanggung jawabnya. Perkembangan media sosial menghadirkan ruang baru dalam hubungan tersebut karena memungkinkan warga memperoleh informasi, berinteraksi dengan aktor politik, dan menyampaikan penilaian terhadap pemerintah. Namun, kedekatan yang terbentuk melalui komunikasi digital belum dengan sendirinya menggambarkan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai institusi. Starke dkk. (2020) menunjukkan pentingnya memperhatikan peran penilaian terhadap figur politik dalam menjelaskan hubungan antara interaksi di media sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, popularitas dan keterlibatan digital perlu dibedakan dari penilaian masyarakat mengenai kelayakan pemerintah untuk dipercaya.

Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2024, persoalan tersebut relevan diperhatikan melalui munculnya ekspresi ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di ruang digital. Salah satunya adalah fenomena tagar #KaburAjaDulu yang dibahas oleh Irhamdhika dkk. (2025) dalam kaitannya dengan krisis kepercayaan publik dan respons komunikasi pemerintah. Fenomena tersebut menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat menilai pemerintah setelah proses elektoral berakhir dan pemerintahan menjalankan kebijakannya. Meskipun demikian, ekspresi ketidakpuasan yang terlihat di media sosial belum cukup untuk menggambarkan tingkat kepercayaan kelompok pengguna secara keseluruhan. Unggahan yang memperoleh

perhatian luas juga belum menjelaskan apakah penilaian masyarakat berkaitan dengan kemampuan pemerintah, kepeduliannya terhadap kepentingan publik, atau integritasnya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran yang dapat membedakan aspek-aspek penilaian tersebut.

Persoalan ini relevan dikaji pada Generasi Z atau Gen Z karena keterlibatannya dalam aktivitas politik melalui media sosial. Amin dkk. (2025) menunjukkan bahwa partisipasi politik digital Gen Z dapat dipahami melalui faktor penerimaan teknologi dan kesadaran politik. Namun, penjelasan mengenai keterlibatan tersebut belum dengan sendirinya memberikan gambaran mengenai kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Urgensi penelitian kepercayaan publik pada kelompok ini terletak pada kebutuhan untuk memahami penilaian generasi muda terhadap pemerintah pusat yang menyelenggarakan kebijakan terkait kehidupan dan masa depan mereka. Pengukuran tersebut diperlukan agar keterlibatan Gen Z dalam pembicaraan politik tidak langsung diartikan sebagai dukungan ataupun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Platform X menjadi ruang kajian yang relevan karena memungkinkan komunikasi antara warga, politisi, dan jurnalis dalam pembahasan persoalan publik. Gil de Zúñiga dkk. (2024), melalui survei panel di Amerika Serikat, menemukan bahwa interaksi dengan politisi dan jurnalis di Twitter berkaitan dengan penilaian yang lebih positif terhadap kinerja serta kepercayaan kepada pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan relevansi interaksi pada platform ini dalam kajian penilaian politik masyarakat. Akan tetapi, cakupan penelitiannya belum secara khusus menjelaskan Gen Z di Indonesia. Penelitian tersebut juga membedakan interaksi langsung dengan aktor politik dari penggunaan informasional dan ekspresif, seperti membagikan ulang atau mengomentari konten. Perbedaan konteks dan bentuk penggunaan ini memberikan alasan untuk mengkaji kepercayaan pada kelompok pengguna X secara lebih spesifik.

Penelitian mengenai kinerja dan kepercayaan menunjukkan bahwa penilaian terhadap pemerintah perlu memperhatikan hasil kerja sekaligus proses penyelenggaraan pemerintahan. Van Ryzin (2011), melalui penelitian lintas negara mengenai kepercayaan terhadap aparatur pemerintah, menemukan bahwa kualitas proses, termasuk keadilan, memiliki peran penting dalam menjelaskan kepercayaan. Temuan tersebut memperluas pemahaman bahwa pencapaian hasil belum cukup untuk menjelaskan seluruh penilaian masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Namun, objek penelitian tersebut adalah aparatur pemerintah sehingga hasilnya perlu dibaca secara hati-hati ketika digunakan untuk memahami kepercayaan terhadap pemerintah pusat sebagai institusi politik. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada perlunya membedakan penilaian terhadap kemampuan pemerintah dari penilaian terhadap cara pemerintah menjalankan tanggung jawabnya.

Sementara itu, penelitian mengenai komunikasi politik digital memperlihatkan bahwa hubungan penggunaan media sosial dengan kepercayaan tidak selalu berlangsung secara langsung. Starke dkk. (2020), dalam konteks Jerman, tidak menemukan hubungan langsung yang signifikan antara interaksi dengan politisi melalui media sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hubungan tidak langsung ditemukan melalui penilaian terhadap daya tarik personal politisi. Pada cakupan yang lebih luas, tinjauan

sistematis Lorenz-Spreen dkk. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media digital berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik dan konsumsi informasi, sekaligus memperlihatkan hubungan negatif dengan kepercayaan terhadap institusi politik dalam sejumlah penelitian. Keragaman temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses informasi dan keterlibatan politik belum dapat digunakan sebagai petunjuk tunggal mengenai tingkat kepercayaan. Pengukuran pada kelompok dan konteks tertentu diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah.

Dalam konteks Indonesia, Amin dkk. (2025) memberikan penjelasan mengenai partisipasi politik digital pada mahasiswa Gen Z di Sumatera Utara, tetapi mengakui bahwa kepercayaan institusional belum sepenuhnya terakomodasi dan karakteristik masing-masing platform belum dibedakan secara mendalam. Berdasarkan penelitian yang diulas, masih terdapat ruang untuk menempatkan kepercayaan terhadap pemerintah pusat sebagai objek pengukuran pada Gen Z pengguna X di Jakarta. Kesenjangan tersebut dijawab melalui penyajian profil kepercayaan berdasarkan dimensi kompetensi, benevolensi, dan integritas, dengan mengadaptasi kerangka *perceived trustworthiness* Grimmelikhuijsen dan Knies (2017). Kerangka tersebut memungkinkan penilaian terhadap kelayakan pemerintah untuk dipercaya dipahami secara multidimensi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai perbedaan penilaian antardimensi dalam kelompok, platform, wilayah, dan periode pemerintahan yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada Gen Z pengguna X yang berdomisili di Jakarta dan pernah berpartisipasi politik melalui platform tersebut. Pemilihan Jakarta mempertimbangkan konteks perkembangan masyarakat digitalnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2026) melaporkan bahwa Jakarta memperoleh skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025 sebesar 56,97, yang merupakan capaian tertinggi secara nasional. Capaian tersebut memberikan konteks pendukung bagi penelitian mengenai kelompok yang menggunakan media sosial untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam pembicaraan politik. Dalam penelitian ini, Jakarta menjadi lokasi domisili responden, sedangkan objek kepercayaan yang dinilai adalah pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di kalangan Gen Z pengguna X di Jakarta pasca-Pemilu 2024 melalui dimensi kompetensi, benevolensi, dan integritas. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya bukti empiris mengenai profil kepercayaan publik pada kelompok yang berpartisipasi politik secara digital dalam konteks Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi awal bagi pemerintah untuk mengidentifikasi aspek kepercayaan yang memerlukan perhatian dalam membangun hubungan dengan generasi muda. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat pada Gen Z pengguna media sosial X di Jakarta pasca-Pemilu 2024?

2. Dimensi dan Konsep Kepercayaan Publik

Mayer *dkk.* (1995) mendefinisikan *trust* sebagai kondisi ketika suatu pihak berada dalam keadaan rentan dan bersedia pasrah, tanpa kemampuan untuk mengontrol tindakan pihak lain yang dapat berdampak pada dirinya. Definisi ini menekankan bahwa *trustor* tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan *trustee* sehingga berada dalam kondisi rentan (*vulnerable*). Relasi antara *trustor* dan *trustee* melahirkan unsur *trustworthiness* yang menjelaskan mengapa *trustee* layak dipercaya. Unsur *trustworthiness* tidak diartikan sebagai kualitas nyata yang ditunjukkan oleh *trustee*, tetapi sebagai persepsi yang dianut oleh *trustor* terhadap *trustee* (Bouckaert and Van de Walle, 2003).

Dalam mengukur kepercayaan publik, McEvily dan Tortoriello (2011, dalam Grimmelikhuijsen & Knies, 2015) menjelaskan definisi dari ketiga dimensi *trust*, yaitu: 1) *Perceived competence* berarti harapan masyarakat terhadap pemerintah untuk bersikap kompeten, efektif, dan profesional; 2) *Perceived benevolence* berarti harapan masyarakat terhadap pemerintah untuk berorientasi pada kesejahteraan publik; 3) *Perceived integrity* berarti harapan masyarakat agar pemerintah bekerja dengan sepenuh hati, berkata jujur, dan memenuhi janjinya. Setiap dimensi dari ukuran *trust* memiliki jumlah indikatornya masing-masing, yaitu: 1) *Competence* memiliki tiga indikator utama, yaitu persepsi bahwa organisasi (1) memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas (*capable*), (2) memiliki tingkat keahlian yang tinggi (*expert*), dan (3) mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik (*carries out its duty very well*) (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015); 2) *Benevolence* memiliki indikator, yaitu persepsi bahwa organisasi (1) berupaya membantu masyarakat ketika dibutuhkan, (2) bertindak berdasarkan kepentingan publik, dan (3) memiliki kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan masyarakat (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015); 3) *Integrity* diukur melalui tiga indikator utama yang bersifat lebih spesifik dan terukur. (1) Organisasi pemerintah dipersepsikan bertindak secara tulus (*acts sincerely*), yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bersifat manipulatif atau didorong oleh kepentingan tersembunyi, melainkan benar-benar mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik. (2) Organisasi dipersepsikan bersikap jujur dalam tindakan dan komunikasi (*is honest*), yang berarti informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat transparan, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan kondisi sebenarnya. (3) Organisasi dipersepsikan dapat dipercaya dalam setiap tindakannya (*is trustworthy*), yang mencerminkan konsistensi perilaku organisasi dalam jangka waktu tertentu serta kemampuannya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Variabel *Public Trust*

Konsep Utama	Definisi Konseptual	Dimensi (*Trustworthiness*)	Definisi Dimensi	Indikator
Kepercayaan Publik (*Public Trust*)	Kesediaan *trustor* untuk berada dalam kondisi rentan terhadap tindakan trustee akibat persepsi bahwa *trustee* dapat dipercaya dan memiliki persepsi positif.	*Perceived Competence*	Harapan masyarakat agar pemerintah bersikap kompeten, efektif, dan profesional.	1) *Capable*: Pemerintah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas 2) *Expert*: Pemerintah memiliki keahlian yang tinggi 3) *Carries out its duty very well*: Pemerintah mampu melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan baik
		Perceived Benevolence	Harapan masyarakat agar pemerintah berorientasi pada kesejahteraan publik.	1) Pemerintah berupaya membantu masyarakat ketika dibutuhkan 2) Pemerintah bertindak berdasarkan kepentingan publik 3) Pemerintah memiliki kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan masyarakat
		Perceived Integrity	Harapan masyarakat agar pemerintah bekerja sepenuh hati, jujur, dan menepati janji.	1) *Acts sincerely:* Pemerintah bertindak secara tulus tanpa kepentingan tersembunyi 2) *Honest*: Pemerintah bersikap jujur dalam setiap tindakan serta informasi 3) *Trustworthy*: Pemerintah konsisten menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat

Sumber: (McEvily dan Tortoriello, 2011 dalam Grimmelikhuijsen & Knies, 2015)

Berdasarkan kerangka konsep di atas yang didasarkan pada tinjauan teoritis, kerangka konsep dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kapabilitas, niat baik, dan integritas pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.

3. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat kepercayaan publik Generasi Z terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DKI Jakarta. Pengukuran kepercayaan publik mengacu pada tiga dimensi, yaitu kompetensi (*Competence*), benevolence (*Benevolence*), dan integritas (*Integrity*), yang dioperasionalkan melalui 9 indikator dan 15 butir pernyataan dalam kuesioner.

Data yang dianalisis merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring dan luring pada Agustus hingga September 2026 oleh Kelompok 3 dalam kegiatan Praktik Penilaian Administrasi Publik FIA UI 2026. Pengumpulan data mencakup lima kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *quota sampling*. Penetapan kuota didasarkan pada pembagian wilayah administratif DKI Jakarta, dengan target awal sebanyak 100 responden untuk setiap kota administrasi sehingga total target keseluruhan ada 500 responden. Pembagian kuota yang sama pada kelima kota administratif bertujuan untuk memberikan keterwakilan wilayah yang seimbang, sehingga pengumpulan data tidak hanya terpusat pada satu atau beberapa wilayah tertentu. Setelah proses pembersihan data *(data cleaning)*, diperoleh 573 responden. Kriteria responden meliputi warga negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta, lahir pada rentang tahun 1997–2006, serta pernah melakukan aktivitas politik melalui media sosial X, seperti memberikan komentar, menyampaikan pendapat, atau mengunggah ulang *(repost)* konten terkait isu politik.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert empat poin, yaitu skor 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk setuju, dan 4 untuk sangat setuju. Data diolah menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) dan dianalisis dengan statistik deskriptif melalui distribusi frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata jawaban responden. Analisis dilakukan untuk menggambarkan tingkat kepercayaan publik secara keseluruhan maupun berdasarkan masing-masing dimensi, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori rendah dan tinggi.

Penggunaan teknik *non-probability sampling* dengan metode *quota sampling* memiliki keterbatasan dalam hal representativitas karena tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggambarkan tingkat kepercayaan publik berdasarkan responden yang berpartisipasi dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh populasi Generasi Z di DKI Jakarta.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pembagian kuesioner yang dilakukan kepada Gen Z pengguna media sosial *X* di DKI Jakarta untuk mengukur tingkat kepercayaan publik mereka menghadirkan sebanyak 573 responden setelah dilakukannya *data cleaning* yang menunjukkan hasil responden dengan karakteristik berikut yang memiliki *P-Value* berdasarkan perhitungan dalam SPSS menggunakan *Chi-Square*:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Competence (% Tinggi)	Benevolence (% Tinggi)	Integrity (% Tinggi)	Kepercayaan Publik (%Tinggi)	P-Value
Jenis Kelamin	Laki-laki	212 (37%)	116 (54,7%)	71 (33,5%)	60 (28,3%)	78 (36,8%)	**.001**
	Perempuan	361 (63%)	177 (49%)	84 (23,3%)	66 (18,3%)	87 (24,1%)	
Jumlah		**573 (100%)**	**293 (51,1%)**	**155 (27,1%)**	**126 (22%)**	**165 (28,8%)**	
Usia	19-22	428 (74,7%)	226 (52,8%)	112 (26,2%)	91 (21,3%)	126 (29,4%)	**.630**
	23-26	121 (21,1%)	54 (44,6%)	35 (28,9%)	28 (23,1%)	31 (25,6%)	
	27-29	24 (4,2%)	13 (54,2%)	8 (33,3%)	7 (29,2%)	8 (33,3%)	
Jumlah		**573 (100%)**	**293 (51,1%)**	**155 (27,1%)**	**126 (22%)**	**165 (28,8%)**	
Domisili	Jakarta Pusat	81 (14,1%)	48 (59,3%)	26 (32,1%)	22 (27,2%)	27 (33,3%)	**.741**
	Jakarta Utara	90 (15,7%)	39 (43,3%)	25 (27,8%)	21 (23,3%)	23 (25,6%)	
	Jakarta Selatan	163 (28,4%)	82 (50,3%)	36 (22,1%)	33 (20,2%)	45 (27,6%)	
	Jakarta Timur	125 (21,8%)	61 (48,8%)	31 (24,8%)	23 (18,4%)	34 (27.2%)	
	Jakarta Barat	114 (19,9%)	63 (55,3%)	37 (32,5%)	27 (23,7%)	36 (31,6%)	
Jumlah		**573 (100%)**	**293 (51,1%)**	**155 (27,1%)**	**126 (22%)**	**165 (28,8%)**	
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	417 (72,8%)	218 (52,3%)	111 (26,6%)	94 (22,5%)	122 (29,3%)	**.845**
	ASN/Pegawai Pemerintah	8 (1,4%)	4 (50 %)	2 (25%)	1 (12,5%)	3 (37,5%)	
	BUMN/BUMD	13 (2,3%)	7 (53,8%)	3 (23,1%)	3 (23,1%)	5 (38,5%)	

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Competence (% Tinggi)	Benevolence (% Tinggi)	Integrity (% Tinggi)	Kepercayaan Publik (%Tinggi)	P-Value
	Pegawai Swasta	73 (12,7%)	35 (47,9%)	24 (32,9%)	15 (20,5%)	22 (30,1%)	
	Wirausaha	9 (1,6%)	2 (22,2%)	3 (33,3%)	3 (33,3%)	3 (33,3%)	
	Pekerja Kontrak	23 (4%)	11 (47,8%)	4 (17,4%)	4 (17,4%)	4 (17,4%)	
	Freelancer	17 (3%)	9 (52,9%)	5 (29,4%)	3 (17,6%)	3 (17,6%)	
	Tidak Bekerja	6 (1%)	4 (66,7%)	3 (50%)	2 (33,3%)	2 (33,3%)	
	Pengajar	4 (0,7%)	2 (50%)	0 (0%)	1 (25%)	1 (25%)	
	Lainnya	3 (0,5%)	1 (33,3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Jumlah		**573 (100%)**	**293 (51,1%)**	**155 (27,1%)**	**126 (22%)**	**165 (28,8%)**	
Pendidikan Terakhir	Tidak Sekolah	1 (0,2%)	1 (100%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (100%)	**.626**
	SMP/MTS/ Sederajat	2 (0,3%)	2 (100%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	
	SMA/SMK/ MA/Sederajat	315 (55%)	160 (50,8%)	86 (27,3%)	68 (21,6%)	91 (28,9%)	
	Diploma (D1-D4)	36 (6,3%)	17 (47,2%)	11 (30,6%)	9 (25%)	9 (25%)	
	Sarjana (S1)	214 (37,3%)	109 (50,9%)	55 (25,7%)	45 (21%)	61 (28,5%)	
	Pascasarjana (S2/S3)	5 (0,9%)	4 (80%)	1 (20%)	3 (60%)	2 (40%)	
Jumlah		**573 (100%)**	**293 (51,1%)**	**155 (27,1%)**	**126 (22%)**	**165 (28,8%)**	
Durasi Penggunaan X Per Hari	< 1 Jam	170 (29,7%)	101 (59,4%)	52 (30,6%)	42 (24,7%)	56 (32,9%)	**.544**
	1 - 2 jam	235 (41%)	124 (52,8%)	60 (25,5%)	53 (22,6%)	67 (28,5%)	
	3 - 4 jam	134 (23,4%)	54 (40,3%)	35 (26,1%)	27 (20,1%)	35 (26,1%)	
	5 - 6 jam	21 (3,7%)	8 (38,1%)	4 (19%)	2 (9,5%)	4 (19%)	
	> 6 jam	13 (2,3%)	6 (46,2%)	4 (30,8%)	2 (15,4%)	3 (23,1%)	

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Competence (% Tinggi)	Benevolence (% Tinggi)	Integrity (% Tinggi)	Kepercayaan Publik (%Tinggi)	P-Value
Jumlah		**573 (100%)**	**293 (51,1%)**	**155 (27,1%)**	**126 (22%)**	**165 (28,8%)**	

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan penilaian yang signifikan berdasarkan jenis kelamin para responden terhadap kepercayaan publik secara keseluruhan (p = 0,001). Responden laki-laki cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan responden perempuan pada semua dimensi kepercayaan publik. Proporsi penilaian tinggi pada dimensi *Competence* mencapai 54,7% pada laki-laki dibandingkan dengan 49% pada perempuan. Perbedaan mencolok lainnya juga ditemukan pada dimensi *Benevolence* (33,5% vs 23,3%) dan dimensi *Integrity* (28,3% vs 18,3%). Selain itu, proporsi kepercayaan publik tinggi juga lebih besar pada responden laki-laki yaitu (36,8%) dibandingkan perempuan (24,1%).

Perbandingan di kategori lain tidak menunjukkan signifikansi statistik (p > 0,05). Meskipun demikian, pola deskriptif menunjukkan beberapa kecenderungan. Dari segi usia, responden yang berada di rentang usia 27-29 tahun memiliki proporsi kategori tinggi yang lebih besar untuk setiap dimensi dan kepercayaan keseluruhan yaitu 54,2% untuk *Competence*, 33,3% untuk *Benevolence*, 29,2% untuk *Integrity*, dan 33,3% untuk kepercayaan keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan responden-responden yang berusia lebih muda. Dari sisi domisili, responden yang berasal dari Jakarta Pusat dan Jakarta Barat cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi pada dimensi *Competence* (masing-masing 59,3% dan 55,3%). Adapun dari sisi durasi penggunaan X, responden dengan durasi <1 jam per hari memiliki proporsi tinggi yang lebih besar pada *Competence* (59,4%) dibandingkan mereka yang memiliki durasi penggunaan X lebih lama per hari.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Publik (n = 573)

Tingkat	Frekuensi	Persentase
Rendah	408	71,2%
Tinggi	165	28,8%
Total	**573**	**100%**

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan tingkat kepercayaan publik berdasarkan hasil kumulatif dari setiap pertanyaan pada kuesioner yang telah diisi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z pengguna media sosial *X* di DKI Jakarta (71,2%) memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun 2026.

Kategorisasi tingkatan "Rendah" dan "Tinggi" digunakan berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh setiap responden pada tiga dimensi variabel kepercayaan publik, yaitu kompetensi (*competence*), benevolensi (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Hasil tersebut kemudian disederhanakan menjadi dua kategori untuk menilai tingkat kepercayaan publik Generasi Z di DKI Jakarta. Penyederhanaan ke dalam dua kategori tersebut dilakukan melalui penetapan nilai dari jumlah item variabel Kepercayaan Publik yang terdiri atas 9 indikator dengan 15 item dan juga 4 poin pada skala Likert:

NT = 4 x 15 = 60
NR = 1 x 15 = 15
$I = \frac{60 - 15}{2} = 23$

Tabel 4. *Range* Kategorisasi Nilai pada Dimensi dan Variabel Penelitian

Variabel	Kategori	Rentang Skor
Kepercayaan Publik	Rendah	15-37
	Tinggi	38-60

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Penetapan nilai sebagai "Rendah" dan "Tinggi" dilakukan untuk menghindari pemusatan jawaban responden dan menegaskan keputusan dari jawaban para responden. Nilai tersebut diambil berdasarkan akumulasi skor per dimensi dari variabel Kepercayaan Publik.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Hasil Penelitian

		Dimensi *Competence*	Dimensi *Benevolence*	Dimensi *Integrity*
N	Valid	573	573	573
	Missing	0	0	0
Mean		12.5794	8.0942	12.2269
Median		13.0000	8.0000	12.0000
Mode		15.00	8.00	12.00
Std. Deviation		3.68840	2.72097	3.64234
Minimum		5.00	4.00	6.00
Maximum		20.00	16.00	24.00

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Tabel 5 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif pada tiga dimensi variabel kepercayaan publik yaitu: *Competence, Benevolence*, dan *Integrity*. Dimensi *Competence* memiliki nilai rata-rata (12.5794), nilai tengah (13.0000), dan modus (15.00). Dimensi *Benevolence* memiliki nilai rata-rata (8.0942), nilai tengah (8.0000), dan modus (8.00). Dan dimensi *Integrity* memiliki nilai rata-rata (12.2269), nilai tengah (12.0000), dan modus (12.00). Untuk menginterpretasikan tingkat kecenderungan pada ketiga dimensi *Competence*, *Benevolence*, dan *Integrity*, peneliti mengelompokkan skor responden ke dalam dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. Penentuan kategori tersebut dilakukan menggunakan interval kelas. Dimensi *Competence* terdiri atas 5 pertanyaan yang memiliki hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Per Item Dimensi *Competence*

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi
1	Menurut saya, pemerintah memiliki sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi perbincangan di platform X.	Sangat Tidak Setuju	47 (8,2%)
		Tidak Setuju	149 (26%)
		Setuju	270 (47,1%)
		Sangat Setuju	107 (18,7%)
	Jumlah		**573 (100%)**
2	Menurut saya, pemerintah memiliki kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan yang yang menjadi perbincangan di platform X.	Sangat Tidak Setuju	60 (10,5%)
		Tidak Setuju	171 (29,8%)
		Setuju	242 (42,2%)
		Sangat Setuju	100 (17,5%)
	Jumlah		**573 (100%)**
3	Menurut saya, pemerintah mampu menyampaikan informasi dengan baik mengenai kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat melalui platform X.	Sangat Tidak Setuju	102 (17,8%)
		Tidak Setuju	190 (33,2%)
		Setuju	201 (35,1%)
		Sangat Setuju	80 (14%)
	Jumlah		**573 (100%)**

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi
4	Menurut saya, pemerintah mampu merespons berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat di platform X.	Sangat Tidak Setuju	119 (20,8%)
		Tidak Setuju	192 (33,5%)
		Setuju	185 (32,3%)
		Sangat Setuju	77 (13,4%)
	Jumlah		**573 (100%**
5	Menurut saya, pemerintah mampu menjalankan komunikasi kebijakan yang baik dengan masyarakat melalui platform X.	Sangat Tidak Setuju	121 (21,1%)
		Tidak Setuju	193 (33,7%)
		Setuju	217 (37,9%)
		Sangat Setuju	42 (7,3%)
	Jumlah		**573 (100%)**

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan kategori pada dimensi *Competence* dengan 3 indikator yang terbagi dalam 5 item pertanyaan:

NT = 5 x 4 = 20

NR = 5 x 1 = 5

$I = \frac{20 - 5}{2} = 8$

Rendah = 5 - 12

Tinggi = 13 - 20

Tabel 7. Dimensi *Competence* (n = 573)

Competence	Frekuensi	Persentase
Rendah	280	48,9%
Tinggi	293	51,1%
Total	573	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Dimensi *Competence* menunjukkan proporsi kategori tinggi dan rendah yang relatif berimbang (51,1% vs 48,9%). Rata-rata skor (12,58) berada sedikit di bawah titik tengah (13.00). Pola per item menunjukkan bahwa responden relatif lebih tinggi pada persepsi mengenai sumber daya dan kapasitas pemerintah (item 1 dan item 2), tetapi lebih kritis terhadap kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan

merespons isu yang menjadi perbincangan di platform X (item 3 - 5). Dengan demikian, responden mengakui kapasitas pemerintah, tetapi meragukan komunikasinya di ruang digital.

Tabel 8. Hasil Per Item Dimensi *Benevolence*

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi
1	Menurut saya, pemerintah secara konsisten menindaklanjuti permasalahan yang masyarakat sampaikan melalui platform X.	Sangat Tidak Setuju	162 (28,3%)
		Tidak Setuju	271 (47,3%)
		Setuju	118 (20,6%)
		Sangat Setuju	22 (3,8%)
	Jumlah		**573 (100%)**
2	Menurut saya, pemerintah telah bertindak dengan mengutamakan kepentingan publik ketika melihat informasi politik yang tersebar di platform X.	Sangat Tidak Setuju	158 (27,6%)
		Tidak Setuju	286 (49,9%)
		Setuju	111 (19,4%)
		Sangat Setuju	18 (3,1%)
	Jumlah		**573 (100%)**
3	Menurut saya, pemerintah telah memanfaatkan platform X sebagai sarana aspirasi bagi masyarakat.	Sangat Tidak Setuju	150 (26,2%)
		Tidak Setuju	248 (43,3%)
		Setuju	156 (27,2%)
		Sangat Setuju	19 (3,3%)
	Jumlah		**573 (100%)**
4	Menurut saya, respons pemerintah terhadap isu politik di platform X mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.	Sangat Tidak Setuju	143 (25%)
		Tidak Setuju	281 (49%)
		Setuju	134 (23,4%)
		Sangat Setuju	15 (2,6%)

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi
	Jumlah		**573 (100%**

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Kategori untuk dimensi *Benevolence* dilakukan menggunakan rumus yang sama dengan dimensi sebelumnya. Dimensi ini memiliki 3 indikator dengan 4 item pertanyaan.

NT = 4 x 4 = 16
NR = 4 x 1 = 4
$I = \frac{16-4}{2} = 6$
Rendah = 4 - 9
Tinggi = 10 - 16

Tabel 9. Dimensi *Benevolence* (n = 573)

Benevolence	Frekuensi	Persentase
Rendah	418	72,9%
Tinggi	155	27,1%
Total	573	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Dimensi *Benevolence* didominasi oleh kategori rendah (72,9%). Rata-rata skor mencapai 8.09 dari rentang 4-16. Pola per item konsisten berada di sisi negatif di mana mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa pemerintah konsisten menindaklanjuti permasalahan, mengutamakan kepentingan publik, memanfaatkan X sebagai sarana aspirasi, maupun mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dalam merespons isu. Temuan ini mengindikasi bahwa penilain negatif tidak hanya terjadi pada satu aspek, tetapi merata pada seluruh indikator dimensi *Benevolence*.

Tabel 10. Item Dimensi *Integrity*

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi
1	Menurut saya, pemerintah menindaklanjuti isu yang diperbincangkan masyarakat di platform X tanpa memiliki kepentingan tersembunyi.	Sangat Tidak Setuju	153 (26,7%)
		Tidak Setuju	300 (52,4%)
		Setuju	103 (18%)
		Sangat Setuju	17 (3%)
	Jumlah		**573 (100%)**
2	Menurut saya, informasi yang	Sangat Tidak Setuju	109 (19%)

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi
	pemerintah sampaikan di platform X sesuai dengan fakta di lapangan.	Tidak Setuju	319 (55,7%)
		Setuju	130 (22,7%)
		Sangat Setuju	15 (2,6%)
	Jumlah		**573 (100%)**
3	Menurut saya, informasi yang pemerintah sampaikan di platform X sesuai dengan data di lapangan.	Sangat Tidak Setuju	116 (20,2%)
		Tidak Setuju	322 (56,2%)
		Setuju	125 (21,8%)
		Sangat Setuju	10 (1,7%)
	Jumlah		**573 (100%)**
4	Menurut saya, pemerintah konsisten memenuhi komitmennya kepada masyarakat melalui platform X.	Sangat Tidak Setuju	155 (27,1%)
		Tidak Setuju	315 (55%)
		Setuju	92 (16,1%)
		Sangat Setuju	11 (1,9%)
	Jumlah		**573 (100%**
5	Menurut saya, pemerintah berusaha menjaga kepercayaan masyarakat berdasarkan informasi yang beredar di platform X.	Sangat Tidak Setuju	136 (23,2%)
		Tidak Setuju	260 (45,4%)
		Setuju	161 (28,1%)
		Sangat Setuju	16 (2,8%)
	Jumlah		**573 (100%)**
6	Menurut saya, pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat dengan merespons berbagai isu yang ada di platform X.	Sangat Tidak Setuju	133 (23,2%)
		Tidak Setuju	273 (47,6%)

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi
		Setuju	151 (26,4%)
		Sangat Setuju	16 (2,8%)
	Jumlah		**573 (100%)**

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Kategori untuk dimensi *Integrity* juga menggunakan rumus yang sama dengan kedua dimensi sebelumnya. Dimensi ini memiliki 3 indikator dengan 6 item pertanyaan.

NT = 6 x 4 = 24
NR = 6 x 1 = 6
$I = \frac{24 - 6}{2} = 9$
Rendah = 6 - 14
Tinggi = 15 - 24

Tabel 11. Dimensi *Integrity* (n = 573)

Integrity	Frekuensi	Persentase
Rendah	447	78%
Tinggi	126	22%
Total	573	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Dimensi *Integrity* memperoleh penilaian terendah dibandingkan seluruh dimensi lainnya (78%). Rata-rata skor berada pada 12,23 dari rentang 6-24. Pola per item memperlihatkan adanya skeptisme yang kuat dari responden terhadap pemerintah, terutama pada ketulusan menindaklanjuti isu tanpa kepentingan tersembunyi dan kejujuran informasi yang disampaikan (item 1 - 3). Proporsi "sangat setuju" di seluruh item hanya berada di tentang 1-3%, menandakan tingkat kepercayaan yang sangat rendah pada aspek kejujuran dan konsistensi pemerintah.

Pembahasan

Gambaran Umum Tingkat Kepercayaan Publik Gen Z di DKI Jakarta

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z pengguna media sosial *X* di DKI Jakarta memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah pasca Pemilu 2024, yaitu sekitar 71,2% dari total responden. Walaupun begitu, perlu diperhatikan bahwa tingkat kepercayaan publik bukanlah sebuah refleksi atas kualitas pemerintah itu sendiri. Bouckaert & van de Walle (2003) menyatakan bahwa *trustworthiness* merupakan persepsi yang dianut oleh *trustor* terhadap *trustee* atau oleh pihak yang memberikan kepercayaan, yang dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat Gen Z pengguna media sosial *X*, kepada pihak yang menerima kepercayaan, yaitu pemerintah. Maka dari itu, walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z pengguna media sosial *X* di DKI Jakarta memiliki kepercayaan

publik yang rendah pasca Pemilu 2024, hal tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai bukti bahwa pemerintah pasca Pemilu 2024 memiliki kinerja yang buruk karena hasil masih berupa persepsi. Walaupun begitu, persepsi yang dimiliki responden juga merupakan akumulasi dari pengalaman yang mereka rasakan dari pemerintah yang menghadirkan keresahan atas masa depan mereka di negara ini (Franco & Salman, 2026).

Lebih dari itu, temuan yang didapatkan sejalan dengan penelitian dari Irhamdhika dkk. (2025) yang menghubungkan ekspresi masyarakat di media sosial dengan kekecewaan terhadap pemerintah dan kekhawatiran terhadap kesempatan kerja, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dicerminkan dalam tagar-tagar yang digunakan di media sosial seperti tagar #KaburAjaDulu yang sejalan dengan penelitian dari Irhamdika dkk. (2025). Lebih dari itu, penelitian ini juga menemukan beberapa tagar lain yang diketahui responden sebagai bagian dari ekspresi masyarakat terhadap pemerintah, seperti tagar #IndonesiaGelap, #ResetIndonesia, dan #MakzulkanPrabowoGibran. Penggunaan tagar-tagar tersebut untuk menunjukkan ekspresi masyarakat serupa dengan relasi antara *trustor* dan *trustee* yang dinyatakan oleh Mayer dkk. (1995) di mana masyarakat dalam hal tersebut merupakan kelompok yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan pemerintah yang berdampak pada mereka. Ekspresi tersebut selaras dengan argumen dari Hendricks dkk. (2022) yang menyatakan bahwa generasi muda, dalam konteks penelitian ini adalah Generasi Z, memiliki kepedulian kualitas hidup dan lingkungan mereka, dan hal tersebut juga menjadi dorongan bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui media sosial seperti apa yang dikatakan oleh Irhamdhika dkk. (2025) dan Franco & Salman (2026).

Melanjuti dari itu, ditemukan bahwa mayoritas Generasi Z yang mengisi kuesioner berjenis kelamin perempuan (63%) Adanya dominasi perempuan dalam survei yang dilakukan mendukung temuan sebelumnya dari Zlobina dkk. (2024) mengenai temuan bahwa perempuan cenderung untuk mempunyai kemauan untuk berpartisipasi yang lebih besar terhadap isu-isu mengenai kehidupan sosial dan pengaruh dari politik. Tingginya kemauan untuk berpolitik tersebut dijelaskan oleh Cirimele dkk. (2025) sebagai akibat dari kurang direpresentasikannya perempuan dalam urusan politik di masa sebelumnya dan adanya kesempatan untuk mengubah pandangan karena kehadiran media sosial seperti platform *X*. Maka karena itu, penelitian ini mendapatkan jumlah responden perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki.

Selain dari jenis kelamin, penelitian ini juga melihat karakteristik responden berdasarkan rentang usia mereka di mana mayoritas berada di rentang usia 19-22 tahun (74,7%) pada saat mengisi kuesioner. Rentang usia tersebut juga identik dengan rentang usia mahasiswa di Indonesia yang juga merasa bahwa diri mereka memiliki peran untuk menjadi seorang agen perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Hendricks dkk., 2022; Ismaidar & Sinaga, 2023).

Penelitian juga melihat responden berdasarkan domisili mereka yang menunjukkan adanya keunggulan dari responden yang berdomisili di Jakarta Selatan sebagai pengisi kuesioner (28,4%). Dikarenakan keterbatasan waktu, peneliti tidak

mampu untuk mendapatkan minimal 100 responden yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam quota sampling sehingga jumlah representasi per daerah kurang seimbang. Pola penyebaran tersebut menunjukkan keunikan di mana populasi Generasi Z di Jakarta Timur berjumlah terbanyak di DKI Jakarta, tetapi jumlah responden terkalahkan oleh wilayah Jakarta Selatan yang menduduki peringkat ketiga dalam jumlah populasi di DKI Jakarta (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024). Walaupun begitu, data mengenai populasi wilayah DKI Jakarta yang terbagi antara kota-kota administratif hanya ditemukan pada tahun 2023. Selain itu, berdasarkan Indeks Masyarakat Digital (2026) pada tahun 2025, daerah dengan tingkat masyarakat digital tertinggi jatuh pada Jakarta Barat dengan poin 61,58 yang diikuti Jakarta Selatan dengan poin 59,93, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakarta Selatan lebih unggul dibandingkan Jakarta Barat dalam frekuensi pengisi kuesioner. Selain itu, Indeks Masyarakat Digital (2026) juga menyatakan daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sebagai daerah dengan poin terendah yang sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana keduanya memiliki frekuensi responden paling kecil.

Karakteristik selanjutnya adalah frekuensi pekerjaan responden berdasarkan pekerjaan yang mereka miliki, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa pada saat pengisian kuesioner (72,8%). Hasil survei tersebut mendukung argumen penelitian sebelumnya oleh Zlobina dkk. (2024) dan juga Hendricks dkk. (2022) bahwa generasi muda dalam bentuk pelajar merupakan golongan yang aktif untuk berpartisipasi dalam isu-isu politik demi meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selanjutnya adalah frekuensi responden berdasarkan pendidikan terakhir yang mereka selesaikan yang di mana mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir berupa SMA/SMK/MA/Sederajat (55%). Arti dari data tersebut adalah bahwa sebagian besar dari responden ini setidaknya merupakan mahasiswa atau pernah menjadi mahasiswa yang identik dengan peran sebagai agen perubahan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup (Hendricks, 2022; Ismaidar & Sinaga, 2023).

Karakteristik terakhir adalah frekuensi berdasarkan durasi penggunaan X per hari yang didominasi oleh rentang waktu 1-2 jam (41%) bagi para responden. Temuan tersebut berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya oleh We Are Social (2026) yang menyatakan bahwa durasi penggunaan platform X di Indonesia hanya berada di angka 29 menit. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki tingkat durasi penggunaan X yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Analisis tingkat kepercayaan publik berdasarkan dimensi *Competence*

Dimensi *Competence* mengacu pada persepsi masyarakat mengenai kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, efektif, dan profesional (McEvily dan Tortoriello dalam Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Dalam hal itu, pemerintah dipandang berdasarkan kapasitas teknis dan keahlian yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan dan menjalankan kebijakan (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Temuan yang dihasilkan penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan memperoleh

penilaian yang relatif lebih positif dibandingkan dengan dimensi kepercayaan lainnya, yaitu 51,1% dari total responden. Namun, selisih antara kategori tinggi dan rendah hanya sebesar 2,2 poin persentase. Oleh karena itu, hasil ini belum dapat diartikan sebagai adanya dukungan atau kepercayaan yang kuat terhadap kompetensi pemerintah. Proporsi responden yang memberikan penilaian rendah juga masih cukup besar, yaitu hampir setengah dari keseluruhan responden (48,9%), yang menunjukkan bahwa perasaan responden terbelah mengenai dimensi ini.

Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam dimensi ini berkaitan dengan persepsi masyarakat bahwa pemerintah sudah memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi perbincangan di media sosial *X*. Namun, responden juga merasa bahwa pemerintah belum mampu memberikan respons yang baik kepada masyarakat terkait isu-isu yang menjadi perbincangan. Hal tersebut selaras dengan relasi *trustor* dan *trustee* menurut Mayer dkk. (1995) di mana masyarakat dalam hal ini merasa pemerintah sudah memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk bertindak, tetapi respons yang diberikan pemerintah masih kurang terhadap keperluan kepentingan publik yang dipercayai oleh para responden.

Penilaian yang terpecah tersebut menunjukkan bahwa pengakuan responden terhadap kapasitas struktural pemerintah tidak secara otomatis menghasilkan kepercayaan publik yang tinggi. Dalam hal tersebut, aspek yang dapat disoroti adalah terkait komunikasi yang diberikan pemerintah kepada publik. Dari item-item yang berada di dimensi *Competence* dapat ditemukan bahwa nilai tinggi cenderung berada di item 1 dan item 2 yang mempertanyakan persepsi mereka terhadap sumber daya dan kemampuan pemerintah, sementara nilai rendah berada di item 3, 4, dan 5 yang mengukur persepsi mereka pada komunikasi pemerintah. Maka karena itu, dapat dilihat bahwa terpecahnya persepsi responden pada dimensi ini terjadi karena persepsi bahwa komunikasi yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki.

Dengan demikian, dimensi *Competence* memperlihatkan bahwa responden memiliki penilaian yang beragam terhadap kapasitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian responden telah memberikan penilaian positif terhadap kemampuan pemerintah, tetapi sebagian lainnya masih menunjukkan keraguan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persepsi mengenai kemampuan pemerintah belum sepenuhnya terkonsolidasi menjadi penilaian positif di kalangan responden.

Analisis tingkat kepercayaan publik berdasarkan dimensi *Benevolence*

Dimensi *Benevolence* berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap kepedulian pemerintah terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (McEvily dan Tortoriello dalam Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Dalam konteks penelitian ini, dimensi tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana responden menilai bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan publik dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menjalankan pelayanan publik dan kebijakan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya dominasi kategori rendah yang mengindikasikan adanya keraguan responden mengenai sejauh mana pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menempatkan kepentingan publik sebagai

pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka kepercayaan publik, kepedulian pemerintah merupakan aspek penting karena kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas, tetapi juga melalui persepsi bahwa pemerintah peduli terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Tingkat kepercayaan yang rendah pada dimensi ini tampaknya berkaitan dengan rendahnya persepsi masyarakat terhadap pemerintah akibat respons mereka yang kurang terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal tersebut, mayoritas responden menilai bahwa pemerintah belum konsisten dalam menindaklanjuti permasalahan dan juga belum mengutamakan kepentingan publik. Selain itu, pemerintah juga belum mengoptimalkan platform *X* sebagai sarana untuk menyaring aspirasi publik dan memberikan respons atas suatu permasalahan. Dalam konsep *trust* yang diberikan oleh Mayer dkk. (1995) kondisi tersebut menunjukkan relasi antara kedua pihak *trustor*, yaitu masyarakat, dan *trustee*, yaitu pemerintah di mana masyarakat tidak mampu dalam mengendalikan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Pemerintah dalam hal ini dipersepsikan sebagai sebuah entitas yang bergerak bukan karena kepeduliannya terhadap masyarakat bagi mayoritas responden. Dengan demikian, hasil pada dimensi *Benevolence* menunjukkan bahwa aspek kepedulian terhadap masyarakat masih menjadi bagian yang memperoleh penilaian kurang positif dari mayoritas responden. Temuan ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan publik serta keterbukaan dalam menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Berdasarkan Dimensi *Integrity*

Dimensi *Integrity* merujuk pada harapan masyarakat terhadap pemerintah yang jujur dan konsisten dalam menjunjung nilai-nilai dan norma yang berlaku (McEvily dan Tortoriello dalam Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Dalam hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat berjalan sebagai organisasi yang tulus, yaitu tidak manipulatif dan bergerak atas kepentingan rakyat, jujur dalam tindakan dan komunikasi, dan memiliki perilaku yang konsisten dalam menjaga kepercayaan masyarakat (McEvily dan Tortoriello dalam Grimmelikhuijsen & Knies, 2015).

Temuan dari penelitian menunjukkan dimensi *Integrity* sebagai dimensi yang memiliki nilai terendah dengan sebanyak 78% responden meragukan integritas dari pemerintah pasca pemilu 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi bahwa pemerintah belum berjalan secara tulus, jujur, dan konsisten dalam memenuhi janji (McEvily dan Tortoriello dalam Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Walaupun begitu, perlu diingat bahwa penilaian tersebut didasari atas persepsi yang dimiliki masyarakat terkait integritas pemerintah saat ini, dan bukan merupakan bukti langsung bahwa pemerintah memiliki integritas yang rendah.

Tingkat kepercayaan yang rendah dalam dimensi ini berkaitan dengan persepsi mayoritas responden bahwa pemerintah belum bersikap jujur dalam menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat dan pemerintah memiliki upaya yang kecil dalam menjaga kepercayaan mereka. Dalam hal tersebut, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka merasa bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai

dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan mayoritas responden juga merasa bahwa tindakan yang diambil pemerintah dilakukan berdasarkan kepentingan tersembunyi. Lebih dari itu, mayoritas responden juga merasa bahwa pemerintah sendiri kurang berusaha dalam menjaga kepercayaan publik terhadapnya di tengah isu-isu yang beredar. Dalam konsep *trustor* dan *trustee* oleh Mayer dkk. (1995), fenomena ini menunjukkan suatu hal unik di mana kepercayaan *trustor*, masyarakat. Yang rendah terjadi karena mereka sendiri merasa bahwa *trustee,* pemerintah, memiliki upaya yang kecil dalam menjaga tingkat kepercayaan para *trustor*. Dengan demikian, rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah di Indonesia menekan legitimasi pemerintah di mata masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat merasa bahwa para penguasa dan institusi negara tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu, maka proses politik menjadi rentan diperjualbelikan dan semakin menekan legitimasi publik (Tambunan, 2022).

Analisis Perbandingan Per Dimensi Kepercayaan Publik

Perbedaan hasil penilaian antardimensi yang ditemukan memiliki makna konseptual yang penting dalam kerangka teori kepercayaan. Mayer dkk. (1995) mengatakan bahwa kepercayaan merupakan kesediaan suatu pihak yang memberikan kepercayaan (*trustor*) untuk berada dalam posisi rentan terhadap tindakan pihak yang dipercaya (*trustee*), berdasarkan persepsi dari tiga dimensi yaitu *Competence*, *Benevolence*, dan *Integrity*. Dalam hal tersebut, ketiga dimensi merupakan hal yang bersifat saling melengkapi dan bukan hal yang saling menggantikan. Temuan penelitian ini menemukan bahwa responden Gen Z pengguna X di DKI Jakarta memberikan penilaian yang relatif lebih positif terhadap aspek *Competence* pemerintah, tetapi mereka meragukan pemerintah dari segi *Benevolence* dan *Integrity* mereka.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa pengakuan responden terhadap kemampuan teknis pemerintah belum disertai dengan keyakinan bahwa pemerintah bertindak atas dasar kepedulian terhadap kepentingan publik serta kejujuran dan konsisten. Pola yang ditemukan serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ananditha dkk. (2025) yang menganalisis mengenai kepercayaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya terhadap DPR RI dengan dimensi *Competence* mendapatkan nilai 2.59 (cukup) sementara *Benevolence* dan *Integrity* masing-masing memiliki nilai 2.45 dan 2.37 yang tergolong rendah keduanya. Sebaliknya, penelitian dari Rahayu dkk. (2025) menunjukkan pola yang berbeda dalam analisis kepercayaan publik terhadap kepolisian di Surabaya pasca demonstrasi di mana penelitiannya menemukan nilai yang serentak rendah di semua dimensi yaitu *Competence*, *Integrity*, dan *Procedural* masing-masing memiliki nilai 21.94, 21.26, dan 21,70. Dalam perspektif Grimmelikhujisen & Knies (2017), kondisi demikian menjelaskan mengapa kepercayaan total responden terhadap pemerintah pusat tetap sangat rendah meskipun salah satu dimensi (*Competence*) memperoleh penilaian yang lebih baik. Penemuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui persepsi kemampuan pemerintah, tetapi juga memerlukan keyakinan bahwa pemerintah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan dapat dipercaya secara moral.

Temuan ini sejalan dengan argumen Bouckaert dan van de Walle (2003) bahwa *trustworthiness* atau kepercayaan merupakan persepsi yang dianut, dan bukan semata-mata merefleksikan kinerja objektif. Dalam konteks komunikasi politik digital, penilaian *Competence* yang relatif lebih tinggi dapat dikaitkan dengan persepsi terhadap kapasitas kelembagaan atau sumber daya pemerintah, sementara rendahnya *Benevolence* dan *Integrity* lebih mencerminkan evaluasi terhadap niat dan kredibilitas komunikasi pemerintah di ruang publik digital (Starke dkk., 2020). Pola serupa juga tercermin dalam studi mengenai krisis kepercayaan dan ekspresi kekecewaan Gen Z di media sosial (Irhamdhika dkk., 2025; Franco & Salman, 2026), di mana keraguan terhadap niat dan integritas pemerintah menjadi penentu utama menurunnya kepercayaan, bukan semata-mata penilaian terhadap kemampuan teknis. Hal tersebut menunjukkan peran penting dari komunikasi pemerintah dalam mempengaruhi kepercayaan publik terhadap mereka. Penelitian dari Hastrida & Hendriyani (2023) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dari pemerintah berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepercayaan publik dan hal tersebut terjadi ketika komunikasi dilakukan secara dialogis dengan adanya faktor orientasi mutualisme dan juga keterbukaan. Temuan dalam penelitian ini didukung temuan Hastrida & Hendriyani (2023) di mana rendahnya dimensi *Benevolence* dan *Integrity* terjadi karena persepsi masyarakat terhadap kurangnya pemerintah memberikan respon terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan juga rasa kurangnya ada kejujuran dalam respon atau informasi yang berasal dari pemerintah. Hal tersebut mendukung urgensi atas adanya perubahan cara komunikasi pemerintah, sesuai dengan penelitian dari Rosmayati dkk. (2026) bahwa strategi komunikasi yang efektif dan dua arah melalui media sosial seperti platform *X* diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Maka karena itu, tingkatan kepercayaan publik yang ditemukan dalam penelitian bukanlah sebuah refleksi atas kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan, tetapi merupakan sebuah persepsi yang masyarakat dapatkan dari komunikasi yang diberikan oleh pemerintah.

6. Kesimpulan

Kepercayaan publik merupakan fondasi yang sangat penting bagi legitimasi pemerintah. Namun, jika kepercayaan publik menurun maka penerimaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pelaksanaan kebijakan publik ikut melemah. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya partisipasi pemilu dan kepatuhan hukum masyarakat (Starke dkk., 2020). Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik pada masa pemerintahan Prabowo Subianto yang diwarnai dinamika komunikasi politik masif melalui media sosial, terutama di kalangan Gen Z pengguna media sosial X di DKI Jakarta. Data dari 573 responden. Temuan pada responden penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (71,2%) belum menaruh kepercayaan yang kuat kepada pemerintah. Namun, kepercayaan yang rendah tersebut tidak terbentuk merata pada ketiga dimensi. Pada dimensi *Competence*, tingkatannya masih terbelah, sedangkan pada dimensi *Benevolence* dan *Integrity* masih rendah. Tingkat terhadapa dimensi *Competence* relatif lebih positif (51,1%), sedangkan penilaian terhadap dimensi *Benovelence* (72,9%) dan *Integrity* (78,0%) berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Artinya, di kalangan

responden penelitian, penilaian terhadap kemampuan atau kapasitas pemerintah Indonesia relatif lebih positif dibandingkan penilaian terhadap ketulusan, niat, kejujuran, dan konsistensi komitmen pemerintah.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkuat bahwa kepercayaan publik tidak cukup hanya dijelaskan oleh kinerja atau kemampuan pemerintah, tetapi harus berjalan beriringan dengan niat, ketulusan, kejujuran, dan konsistensi pemerintah dalam berorientasi pada kepentingan masyarakat. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan persepsi penilaian *Integrity* dan *Benevolence* masyarakat melalui keterbukaan terhadap informasi seluruh kegiatan pemerintahan, konsistensi antara janji politik dan realisasinya, serta menjalin komunikasi publik yang lebih dua arah dengan menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan warga. Terlebih lagi, dalam penggunaan komunikasi di media sosial sebaiknya tidak berhenti pada pencitraan, tetapi disertai dengan dialog yang responsif dan substantif terhadap aspirasi yang muncul di platform seperti *X*. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penggunaan *non-probability quota sampling* yang hanya mencakup Gen Z pengguna *X* di DKI Jakarta sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke semua Gen Z pengguna X di Indonesia. Oleh karena itu, generalisasi terhadap Generasi Z pengguna *X* di DKI Jakarta perlu dihindari karena temuan ini menggambarkan karakteristik dan persepsi responden yang berpartisipasi dalam survei. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian pada kelompok antargenerasi, wilayah, serta lintas platform agar lebih representatif.

Daftar Pustaka

Amin, M., Ritonga, A. D., Situmorang, T. P., & Santoso, A. D. (2025). Revolutionizing political participation: A modified UTAUT model for Generation Z in the digital era. *Frontiers in Political Science*, 7, 1681050. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1681050

Andhini Hastrida & Hendriyani (2023). Pengaruh Komunikasi Dialogis terhadap Kepercayaan pada Pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media.* https://doi.org/10.17933/jskm.2023.5144

Achmad, F., & Dwimawanti, I. H. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi Z dalam pemilu 2024 di Jawa Tengah. Journal of Public Policy and Management Review, 1(1), 975-990. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/49755/33299

Adyatma, D. B., & Setyowati, R. M. (2026). Analisis Isi Kualitatif Terhadap Pola Call To Action Pada Konten Hutan di Akun Instagram @Forestisourfriend. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(3), 812–827. https://doi.org/10.58540/isihumor.v4i3.1956

Ananditha, Y., Alfazry, R., Rhama, B., Santoso, Y. A., & Suprayitno, S. (2025). Persepsi Mahasiswa Terhadap Trust Issue aPublik Mengenai Isu DPR RI (Studi Kasus: Jurusan Ilmu Administrasi Negara). Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 12(2), 697–708. https://doi.org/10.37676/professional.v12i2.9999

Bouckaert, G., & van de Walle, S. (2003). Comparing Measures of Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators of 'Good Governance': Difficulties in Linking Trust

and Satisfaction Indicators. International Review of Administrative Sciences, 69(3), 329–343. https://doi.org/10.1177/0020852303693003

Badan Pusat Statistik (2024). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2023. Diambil dari https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3MCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html

Bossetta, M. (2018). The digital architectures of social media: Comparing political campaigning on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat in the 2016 U.S. election. Journalism & Mass Communication Quarterly, 95(2), 471–496. https://doi.org/10.1177/1077699018763307

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024), Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2023. Diambil dari https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxNiMy/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html

Cirimele, F., Macaluso, M., Agolino, G., Çabuk Kaya, N., & Zappulla, C. (2025). Gender differences in the use of online platforms for political participation. Frontiers in Communication, 10. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1625965

Franco, J., & Salman, D. (2026). Krisis Kepercayaan pada Fenomena Kabur Aja Dulu Studi Resepsi Gen Z dalam Perspektif Komunikasi Krisis. Koneksi, 10(1), 276–284. https://doi.org/10.24912/kn.v10i1.36299

Gil de Zúñiga, H., Goyanes, M., & Mateos, A. (2024). Twitter communication among democracy actors: How interacting with journalists and elected officials influence people's government performance assessment and trust. *Social Media + Society*, *10*(1). https://doi.org/10.1177/20563051241232907

Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 583-601. https://doi.org/10.1177/0020852315585950

Hendricks, L., Edwards, W., Tietjen-Smith, T., & Reysen, S. (2022). College students' awareness and familiarity with modern activism: Prosocial involvement in Black Lives Matter. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 32(4), 534–547. https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1924914

Hair, J. F., Page, M., & Brunsveld, N. (2020). Essentials of Business Research Methods (4th ed.). *New York & London: Roultedge Taylor & Francis Group*

Hastrida, A., & Hendriyani. (2023). PENGARUH KOMUNIKASI DIALOGIS TERHADAP KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 27(2), 141–160. https://doi.org/10.17933/jskm.2023.5144

Irhamdhika, G., El Hidayah, N. I., Ariska, Y., Ningtyas, D. A., & Sari, A. (2025). Krisis kepercayaan publik: Fenomena #KaburAjaDulu dan peran humas pemerintah dalam merespons cancel culture. *Jurnal Public Relations*, 6(1), 7-15. https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8663

Ismaidar, I., & Sinaga, R. H. (2023). Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 10202–10215. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7770

Indeks Masyarakat Digital Indonesia. (2026). Overview Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Diambil dari https://imdi.sdmdigital.id/home

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025*. Diambil dari https://imdi.sdmdigital.id/unduh-laporan/Publikasi%20Indeks%20Masyarakat%20Digital%20Indonesia%28IMDI%29?lang=id

Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, *7*, 74–101. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *The Academy of Management Review*, *20*(3), 709–734. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258792

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.). *Pearson Education Ltd*.

Rosmayati, E., Rachmiatie, A., & Santana, S. (2026). Performance of Public Relations of Bawaslu RI in the Implementation of Crisis Management to Build Public Trust After the 2024 Election. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 540–552. https://doi.org/10.58540/isihumor.v4i2.2154

Rahayu, E. S., Fitria, B. N., Zahra, A. Z., & Jatiningsih, O. (2025). Tingkat Citizen Trust Terhadap Aparat Kepolisian Pasca Demonstrasi di Surabaya 2025. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1974–1985. https://doi.org/10.63822/h4mpjw03

Starke, C., Marcinkowski, F., & Wintterlin, F. (2020). Social networking sites, personalization, and trust in government: Empirical evidence for a mediation model. *Social Media + Society*, April-June, 1-11. https://doi.org/10.1177/2056305120913885

Suryawijaya, T., Fauzy, M. R. N., & Maulidina, N. F. (2024). Peran media sosial dalam membentuk partisipasi politik Gen Z pada Pemilu 2024. *Politica*, 15(2), 125-147. https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4441

We Are Social (2026). Digital 2027 Indonesia. Diambil dari https://wearesocial.com/id/blog/2026/10/digital-2027/

Tambunan, D. (2022). Indonesia under threat: The danger of corruption to political legitimacy. *Asian Journal of Comparative Politics*, *8*(1), 205789112211249. https://doi.org/10.1177/20578911221124965

Van Ryzin, G. G. (2011). Outcomes, process, and trust of civil servants. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *21*(4), 745–760. https://doi.org/10.1093/jopart/muq092

Vyandri, M. A., & Maharani, W. M. (2026). Uncovering account freezing policies: A bibliometric analysis of digital transaction security and financial crime prevention. *Journal of Public Administration Research (JPAP)*, 12(1), 23-35. https://doi.org/10.30996/jpap.v12i1.132622

Zlobina, A., Dávila, M. C., & Zapater, M. B. (2024). Are Today's Young People Active Citizens? A Study of Their Sensitivity to Socio-Political Issues and Their Social Participation. *Journal of Social and Political Psychology*, 12(1), 5–22. https://doi.org/10.5964/jspp.10299